

**ANALISIS PENGARUH PAD
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh :

**Decta Pitron Lugastoro
0910212008**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

**LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

Yang disusun oleh:

Nama : Decta Pitron Lugastoro

NIM : 0910212008

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juli 2013.

Malang, 30 Juli 2013
Dosen Pembimbing,

Prof. Candra Fajri Ananda, SE., MSc., PhD.
NIP 19641029 198903 1 001

**Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur**
Decta Pitron Lugastoro, Candra Fajri Ananda
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email : exactlydipi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Timur. PAD dan dana perimbangan sebagai variabel utama dirasiokan dengan belanja modal. Hal ini berarti menunjukkan seberapa besar kemampuan PAD dan dana perimbangan dalam membiayai belanja modal daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel kontrol berdasar kajian teori dari *Human Development Report* UNDP tahun 1996. Analisis penelitian menggunakan analisis data panel dengan pendekatan *random effect model* (REM)

Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu rasio DBH terhadap belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang tidak signifikan mempengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM

Kata kunci : PAD, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Desentralisasi, Desentralisasi Fiskal

A. PENDAHULUAN

Ekonomi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat krusial. Berbagai macam teori maupun kebijakan ekonomi di terapkan dalam rangka mencapai dan mengusahakan tujuan bersama yang diterjemahkan sebagai kesejahteraan hidup. Secara ekonomi kesejahteraan hidup suatu negara biasa diukur melalui instrument pertumbuhan ekonomi/PDB (*growth*), pendapatan per kapita (*per capita income*) dan indeks pembangunan manusia (*human development index*).

Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tahun 2012 telah mulai melakukan *spending review* APBN terhadap indeks pembangunan manusia. Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto menyampaikan bahwa perbandingan volume APBN dengan IPM di Indonesia sebanding. Hal ini menunjukkan rendahnya *outcome* pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga. Dalam tahap awal, objek *spending review* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan baru sebatas APBN sedangkan *spending review* APBD masih menjadi wacana yang nantinya akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di 30 kota provinsi di Indonesia.

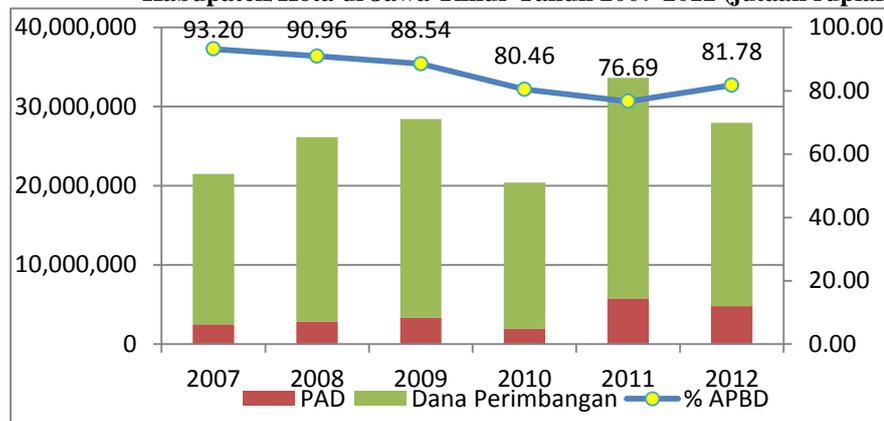
Volume APBN saat ini terus meningkat sebesar tiga kali lipat dibanding tahun 2005. Kondisi itu ternyata belum sesuai dengan peningkatan angka IPM di Indonesia. Bila pada tahun 2005 volume APBN sebesar 509,6 triliun, sedangkan pada tahun 2011 jumlah APBN sebesar 1.320, 8 triliun. Sementara itu, IPM Indonesia pada tahun 2005 berada pada nilai 0,572, sedangkan pada tahun 2011 dalam angka 0,617. Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, pertumbuhan nilai IPM Indonesia masih berada dibawah Thailand. Sedangkan Korea, yang memulai pertumbuhannya pasca krisis lalu bersama dengan Indonesia, saat ini nilai IPM Korea sudah jauh diatas Indonesia.

Pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yakni pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam misi Presiden yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Membahas spending review APBD tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Mulai tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu instrument fiskal dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan/BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dua komponen pendapatan dalam APBD yaitu PAD dan Dana Perimbangan menjadi komponen utama dimana untuk kabupaten/kota di Jawa Timur kedua komponen tersebut menyumbang lebih dari 80% APBD daerah bersangkutan.

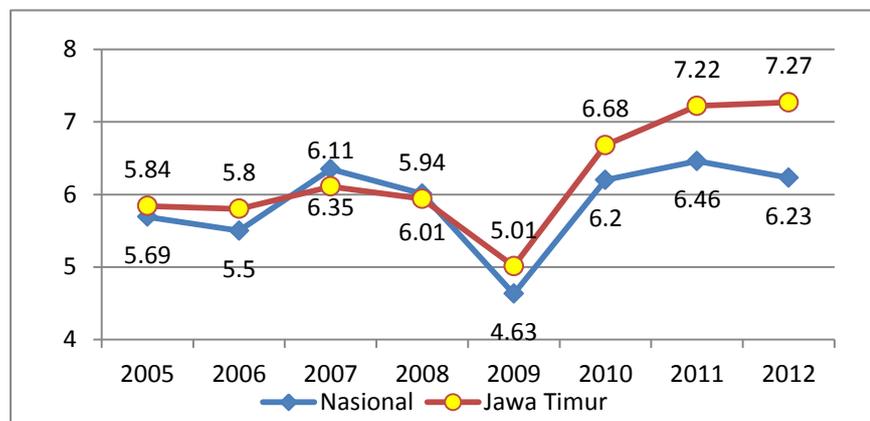
Gambar 1 : Porsi Realisasi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2007-2012 (jutaan rupiah)



Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, 2012

Pelaksanaan APBD di Jawa Timur dapat dikatakan berhasil bahkan beberapa indikator melebihi pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi Jatim dalam kurun waktu 8 tahun terakhir cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional, kecuali pada tahun 2007-2008 yang sedikit berada di bawah nasional. Jika diukur lebih lanjut, kinerja perekonomian Jatim terus meningkat sedangkan perekonomian nasional mulai mengalami perlambatan di tahun 2012.

Gambar 2 : Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Timur 2005-2012



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2012

Jika dibandingkan dengan lima provinsi lain di Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta) pertumbuhan ekonomi Jawa Timur paling tinggi sejak tahun 2010-2012. Adapun untuk mengetahui struktur ekonomi dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor terhadap total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Gambaran lebih menyeluruh mengenai struktur perekonomian Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia khususnya lima provinsi di Jawa, PDRB Jatim turut menyumbang 14,88% PDB Nasional, terbanyak kedua setelah DKI Jakarta pada tahun 2012.

Tabel 1 : Struktur Perekonomian Jawa Timur Tahun 2008-2012

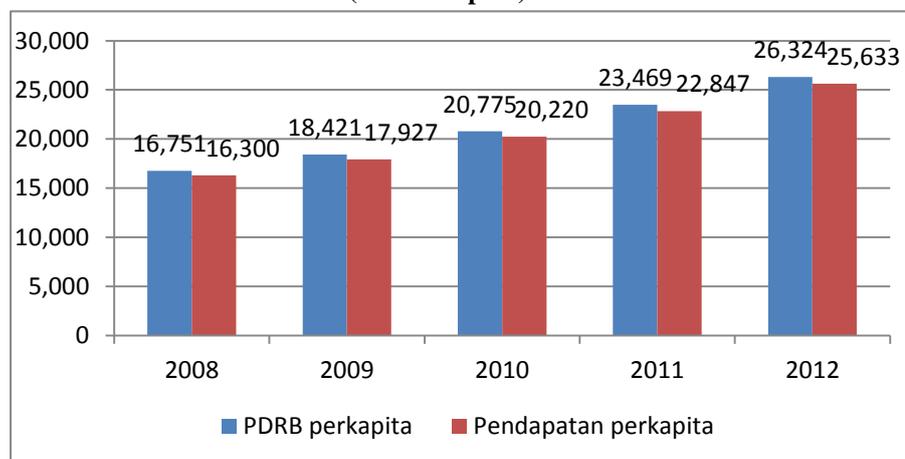
Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	3,12	3,92	2,23	2,53	2,10
2. Pertambangan dan Penggalian	9,31	6,92	9,18	6,08	2,10
3. Industri Pengolahan	4,36	2,80	4,32	6,06	6,34
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3,00	2,72	6,43	6,25	6,21
5. Konstruksi	2,71	4,25	6,64	9,12	7,05
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8,07	5,58	10,67	9,81	10,06
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,98	12,98	10,07	11,44	9,65
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,05	5,30	7,27	8,18	8,01
9. Jasa-Jasa	6,32	5,76	4,34	5,08	5,07
PDRB Jawa Timur	5,94	5,01	6,68	7,22	7,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2012

Kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang meningkat setiap tahunnya diikuti pula oleh PDRB perkapita Jawa Timur. PDRB perkapita dihitung dari besarnya PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Meskipun PDRB perkapita tidak bisa menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk karena dipengaruhi oleh produksi barang dan jasa, namun demikian PDRB perkapita masih cukup relevan untuk mengetahui apakah secara rata-rata pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak. Sementara itu, pendapatan perkapita dihitung dengan menghilangkan faktor “bruto” yang terdiri dari penyusutan dan pajak tidak langsung netto serta ditambahkan dengan pendapatan netto yang masuk wilayah tersebut, sehingga pendapatan perkapita dinilai lebih mendekati keadaan sebenarnya dibandingkan PDRB perkapita.

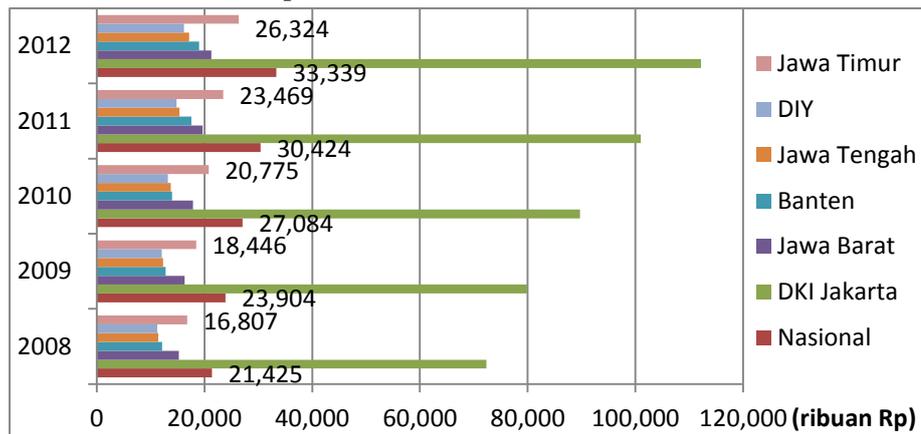
Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur, dapat dilihat pada grafik dibawah bahwa baik PDRB perkapita maupun pendapatan perkapita penduduk Jawa Timur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun PDRB perkapita Jawa Timur lebih rendah dari PDRB perkapita DKI Jakarta maupun PDB perkapita Nasional, namun secara relatif PDRB perkapita Jawa Timur mengalami kenaikan paling besar yaitu 12,16%

Gambar 3 : Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Jawa Timur Tahun 2008-2012 (ribuan rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2012

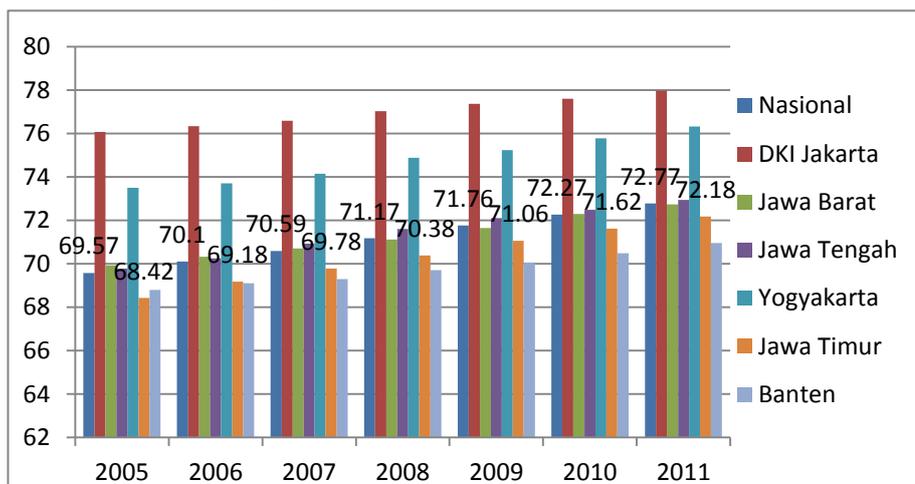
Gambar 4 : PDRB Perkapita Provinsi di Jawa dan PDB Nasional Tahun 2008-2012



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2012

Berbeda dengan evaluasi indikator pembangunan sebelumnya, hasil cukup kontradiktif kita temukan dalam evaluasi pembangunan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika pada indikator sebelumnya Jawa Timur cenderung superior dibandingkan lima provinsi lain di Jawa bahkan Nasional, IPM Jawa Timur hanya “sedikit” lebih tinggi dari IPM Banten yang notabene merupakan provinsi termuda di Jawa. Bahkan dari tahun 1996-2012 IPM Jawa Timur senantiasa lebih rendah dari IPM Nasional.

Gambar 5 : Perkembangan IPM Provinsi di Jawa Tahun 2005-2011



Sumber : BPS, 2012

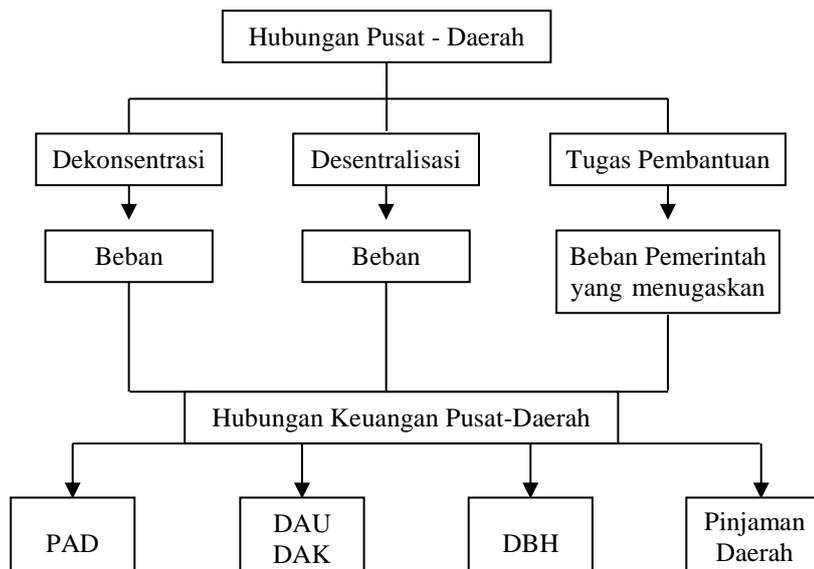
Realita ini sedikit *mencoreng* kinerja perekonomian Jawa Timur yang dalam kurun dasawarsa terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat namun di sisi lain selama bertahun-tahun pula IPM Jawa Timur relatif stagnan dibanding IPM Nasional. Hal ini berarti bahwa *outcome* pembangunan kabupaten/kota di Jawa Timur masih bersifat *bias*, dimana perekonomian dan pembangunan hanya meningkatkan kesejahteraan sebagian penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) menurut UNDP diartikan sebagai ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu (i) panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), (ii) terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan (iii) standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan).

B. KAJIAN PUSTAKA

Membicarakan tema desentralisasi di Indonesia selalu berkaitan dengan dua pokok bahasan yang menjadi *benang merah* desentralisasi itu sendiri, yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah menyangkut kewenangan daerah sedangkan desentralisasi fiskal berkaitan dengan pembiayaan daerah. Paket UU No.22/1999 – UU No.25/1999 dan UU No.32/2004 – UU No.33/2004 merupakan salah satu bukti sekaligus dasar hukum bagaimana pentingnya dua topik tersebut terhadap desentralisasi. Desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diukur dari kemampuan menggali dan mengelola keuangannya.

Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut. Konsep ini dikenal dengan *money follow function*, bukan lagi *function follow money*. Artinya, pemerintah pusat berkewajiban menjamin sumber keuangan terkait dengan pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat-daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Berdasarkan UU No. 33/2004, sumber-sumber pendanaan keuangan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Gambar 6 : Hubungan Keuangan Pusat-Daerah



Sumber : Hanafi (2009:13)

Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal membawa reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemda yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alam menanggapi dengan hati-hati dan rasa khawatir. Hal tersebut terkait dengan seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat diperoleh dari SDA yang dimiliki daerah sebagai sumber pendanaan. Melalui desentralisasi fiskal, pemda diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah (BUMD), dan lain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum (*block grants*)

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan menggantikan subsidi daerah otonom dan dana inpres. DAU sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

a. Formula DAU

$$DAU = AD + CF$$

dimana :

AD = Alokasi Dasar; gaji PNS daerah

CF = Celah Fiskal; kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal

b. Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB/kap)$$

dimana :

TBR = total belanja rata-rata APBD

IP = indeks jumlah penduduk

IW = indeks luas wilayah

IPM = indeks pembangunan manusia

IKK = indeks kemahalan konstruksi

IPDRB/kap = indeks produk domestik bruto regional per kapita

c. Kapasitas Fiskal (KpF)

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

dimana :

PAD = pendapatan asli daerah

DBH Pajak = dana bagi hasil penerimaan pajak

DBH SDA = dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam

d. Porsi DAU

CF > 0 → DAU = alokasi dasar + celah fiskal

CF = 0 → DAU = alokasi dasar

CF negatif < AD → DAU = alokasi dasar setelah diperhitungkan CF

CF negatif ≥ AD → DAU = 0 (nol)

2. Dana Alokasi Khusus (*special grants*)

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas

3. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibedakan menjadi :

a. DBH-Pajak; bagi hasil dari perpajakan, yang terdiri dari PBB, BPHTB dan PPh pasal 21

b. DBH-SDA; bagi hasil yang bersumber dari SDA (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi) yang terdiri dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent dan penerimaan dari uang eksplorasi

Indeks Pembangunan Manusia

UNDP mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar pendapatan domestik bruto (PDB) maupun PDB per kapita. IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia : (i) panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), (ii) terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi), dan (iii) memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan). IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi). Perlu dicatat bahwa IPM mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut. Pengukuran IPM telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali dicetuskan dan yang terpenting adalah indeks tersebut telah disederhanakan sehingga sekarang IPM dihitung secara langsung. Pengukuran IPM yang ditetapkan oleh UNDP sebagai berikut :

1. Indeks harapan hidup (*longevity*)

$$LI_i = \frac{[L_i - LL]}{[HL - LL]} = \frac{L_i - 25}{85 - 25}$$

dimana :

LI_i = indeks harapan hidup negara i

L_i = rata-rata usia harapan hidup negara i

LL = batas usia terendah (25 tahun)

HL = batas usia tertinggi (85 tahun)

2. Indeks pendidikan (*knowledge*)

$$KI_i = \frac{2}{3}li_i + \frac{1}{3}si_i = \frac{2}{3} \left(\frac{[l_i - 0]}{[100 - 0]} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{[s_i - 0]}{[100 - 0]} \right)$$

dimana :

KI_i = indeks pendidikan negara i

li_i = indeks baca tulis orang dewasa negara i (>15 tahun)

si_i = indeks masa sekolah bruto negara i

I_i = persentase baca tulis negara i

s_i = persentase masa sekolah bruto negara i

3. Indeks standar hidup layak (*standard of living*)

$$PI_i = \frac{[\log P_i - \log(100)]}{[\log(40.000) - \log(100)]}$$

dimana :

PI_i = indeks paritas daya beli negara i

P_i = paritas daya beli negara i

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

$$HDI_i = \frac{1}{3}LI_i + \frac{1}{3}KI_i + \frac{1}{3}PI_i$$

dimana :

HDI_i = indeks pembangunan manusia negara i

Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara menegaskan bahwa rencana dan anggaran yang disusun oleh pemerintah menggunakan tiga pendekatan, yaitu (i) anggaran terpadu (*unified budgeting*), (ii) kerangka pengeluaran jangka menengah biasa yang biasa disebut KPJM (*medium term expenditure framework*), dan (iii) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (*performance based budgeting*). Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan berfokus pada PBK sedangkan kedua pendekatan lainnya mendukung penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakan prasyarat penerapan PBK, adapun pendekatan KPJM merupakan jaminan kontinuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga 3-5 tahun kedepan. Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara

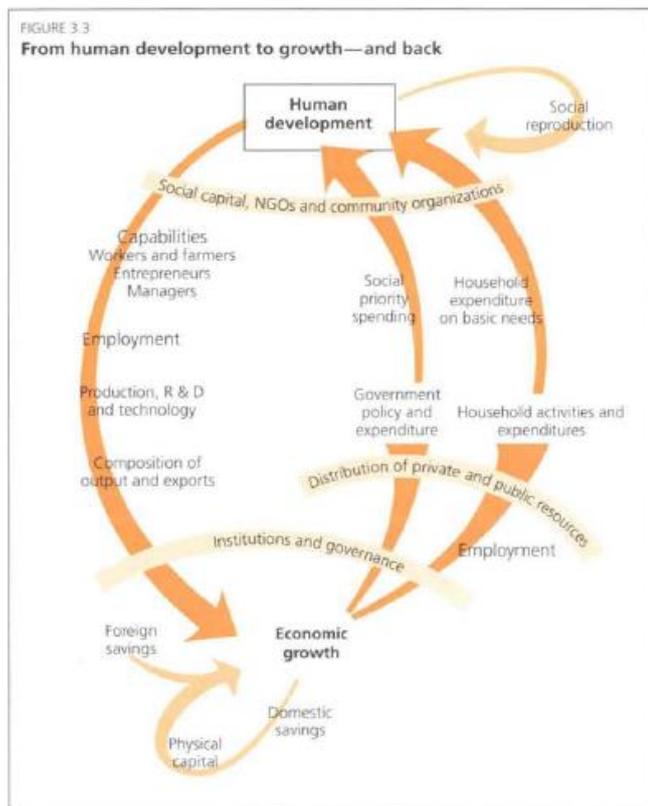
pendanaan (*input*), pelaksanaan anggaran (*output*) dan manfaat yang diharapkan (*outcome*) sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 tahun. Struktur APBD pada komponen belanja daerah, belanja modal merupakan output APBD yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya pembangunan manusia (IPM). Sifat belanja modal yang berupa aset tetap dan bernilai manfaat jangka panjang menjadikan belanja modal sebagai modal/pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat karena mempercepat akses hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi memperluas dan memperbesar pemenuhan materi untuk kebutuhan manusia. Se jauh mana kebutuhan tersebut terpenuhi tergantung dengan alokasi sumber daya, distribusi ekonomi dan peluang kerja dalam perekonomian. Pertumbuhan dan pembangunan manusia (IPM) mempunyai hubungan dua arah yang meskipun tidak berhubungan secara otomatis namun dapat diperkuat dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Ketika pertumbuhan dan IPM mempunyai hubungan yang kuat, mereka saling berkontribusi satu sama lain, tetapi ketika hubungan tersebut lemah mereka akan “merusak” yang lainnya. *Unbalanced link* adalah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi tinggi namun kualitas hidup rendah atau sebaliknya meningkatnya kualitas hidup namun pertumbuhan ekonomi rendah. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dipengaruhi dua rantai utama, yaitu kegiatan/aktifitas dan pengeluaran rumah tangga (*household activities and expenditure*) dan kebijakan dan pengeluaran pemerintah (*government policy and expenditure*).

Gambar 7 : Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia



Sumber : *Human Development Report UNDP, 1996*

Aktifitas rumah tangga seperti mengurus anak, merawat orang tua, mendidik anak berkontribusi langsung terhadap pembangunan manusia. Pekerjaan sukarela tersebut berkontribusi langsung terhadap pemenuhan gizi, kesehatan dan pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Menurut laporan UNDP Korea Selatan sebagai salah satu negara yang perkembangan pendidikannya meningkat pesat dalam tiga dekade terakhir, 65% dari total belanja pendidikan disumbang dari pengeluaran pendidikan rumah tangga. Sedangkan di Brasil, dari 10% peningkatan pendapatan keluarga, 5-8% digunakan untuk biaya pendidikan. Hal penting lainnya adalah kemampuan rumah tangga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar baik di rumah maupun di sekolah. Pendapatan tinggi sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi juga turut menyumbang peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Peningkatan pendapatan rumah tangga selalu dikaitkan dengan peningkatan kesehatan melalui indikator rentang umur yang panjang, dan harapan hidup kelahiran. Namun perlu diingat bahwa meskipun peningkatan pendapatan rumah tangga dapat meningkatkan kesehatan, manfaat tersebut tidak sepenuhnya dapat terealisasi jika pelayanan kesehatan tidak tersedia secara merata.

Melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat menambah sumberdaya untuk pembangunan manusia dengan peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan baik secara fisik (infrastruktur) maupun non fisik (subsidi, jaminan kesehatan). Intervensi pemerintah melalui kebijakannya juga diperlukan untuk mengurangi kegagalan pasar (*market failure*) yang cenderung menghambat investasi. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) melalui berbagai output belanja harus dapat memberi dukungan lebih pada pembangunan manusia.

Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dilain sisi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Pembangunan manusia mungkin tanpa pertumbuhan yang tinggi namun apapun sebabnya yang jelas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua tujuan yang dapat dicapai secara bersamaan.

Kusreni dan Suhab (2009) dalam “Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan”, melakukan penelitian terhadap 22 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasar data panel selama kurun waktu 2003-2007. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan *random effect*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas fiskal, alokasi belanja modal dan pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel yang digunakan meliputi variabel PAD dan DBH (kapasitas fiskal), belanja modal daerah dan pembiayaan daerah terhadap variabel dependen IPM (kesejahteraan masyarakat). Dari estimasi variabel-variabel diatas diperoleh beberapa hasil yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain (i) kapasitas fiskal (PAD dan DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan (IPM), (ii) kapasitas fiskal berpengaruh lebih besar daripada alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan.

Penelitian mengenai pengaruh kapasitas fiskal terhadap IPM juga dilakukan oleh Pambudi (2008). Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat” menggunakan data panel 22 kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode tahun 2002-2006. Metode yang dipakai menggunakan metode analisis data panel yang terdiri dari model *pooled least square (PLS)*, *fixed effect* dan *random effect*. Analisis yang dilakukan menggunakan tiga estimasi yaitu pengaruh PAD terhadap DAU, pengaruh kemandirian fiskal (rasio PAD/TPD) terhadap IPM, dan pengaruh komponen PAD (pajak, retribusi dan bagi hasil BUMD) terhadap IPM. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peningkatan PAD berpengaruh positif terhadap IPM.

Ng'habi (2012) dalam penelitian “Economic Growth and Human Development; A Link Mechanism : An Empirical Approach” menyampaikan penelitian tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (HDI). Penelitian ini menggunakan data dari Human

Development Report 2011 yang diterbitkan oleh UNDP dengan sampel 40 negara. Metode yang dipakai adalah regresi berganda dengan variabel pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi melalui pendapatan perkapita (Y), pembangunan manusia (HDI), ketidakesetaraan IPM (*inequality-adjusted HDI*), dan ketidakesetaraan gender (*gender inequality index, GII*). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berhubungan erat dimana pembangunan manusia merupakan input dari pertumbuhan ekonomi namun pada gilirannya pertumbuhan ekonomi akan mengaktifkan/menaikkan pembangunan manusia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data panel dengan *cross section* berjumlah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan *time series* tahun 2006-2011. Metode analisis menggunakan *random effect model* (REM) dengan model matematis sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_1 + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \beta_5 DBH_{it} + \beta_6 PE_{it} + \varepsilon_i$$

dimana :

- IPM_{it} = indeks pembangunan manusia
- PAD_{it} = rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (PAD/BM)
- DAU_{it} = rasio dana alokasi umum terhadap belanja modal (DAU/BM)
- DAK_{it} = rasio dana alokasi khusus terhadap belanja modal (DAK/BM)
- DBH_{it} = rasio total dana bagi hasil terhadap belanja modal (DBH/BM)
- PE_{it} = pertumbuhan ekonomi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif yang digunakan mengacu pada analisis statistik deskriptif, yang digunakan untuk menjelaskan, meringkas, menyederhanakan, mengorganisasi dan menyajikan data secara statistik kedalam bentuk yang teratur dan sederhana agar mudah dibaca dan dipahami

Tabel 2 : Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

	IPM	PAD	DAU	DAK	DBH	PE
Mean	69.89706	0.532675	3.798553	0.335833	0.550746	5.979649
Median	70.52000	0.400000	3.560000	0.330000	0.425000	5.920000
Maximum	77.89000	3.740000	11.15000	1.130000	5.820000	11.84000
Minimum	56.30000	0.120000	0.570000	0.010000	0.170000	4.100000
Std. Dev.	4.866505	0.458476	1.486588	0.175179	0.526213	1.035967
Skewness	-0.428323	3.826751	1.245955	0.566163	5.858764	2.016035
Kurtosis	2.424750	22.26090	6.217917	4.245404	50.35502	10.50721
Jarque-Bera	10.11518	4080.805	157.3637	26.91534	22608.08	689.8506
Probability	0.006361	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000000
Sum	15936.53	121.4500	866.0700	76.57000	125.5700	1363.360
Sum Sq. Dev.	5376.011	47.71547	501.6572	6.966142	62.85637	243.6228
Observations	228	228	228	228	228	228
Cross sections	38	38	38	38	38	38

Sumber : Output EViews 7.2, diolah

Dari nilai standar deviasi, variabel IPM mempunyai standar deviasi terbesar (4,86) dibandingkan variabel yang lain. Standar deviasi merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data dari mean. Dalam analisis data panel, uji normalitas dapat diabaikan karena jumlah data sangat besar (>100) sehingga sangat dimungkinkan residual terdistribusi normal meskipun probabilitas Jarque-Bera signifikan

Finally, if we are dealing with a small, or finite, sample size, say data of less than 100 observations, the normality assumption assumes a critical role. As we will show subsequently, if the sample size is reasonably large, we may be able to relax the normality assumption (Gujarati, 2004:110)

Penentuan Model Analisis

Pada penelitian ini, penentuan metode analisis data panel yg dipakai merujuk pada beberapa hasil pengujian. Pengujian yang dipakai antara lain (i) *Chow Test* (Likelihood Ratio Test) untuk menentukan antara PLS atau FEM, (ii) *Hausman Test* untuk menentukan antara FEM atau REM.

Tabel 3 : **Hasil Chow Test**

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: FEM

Test cross-section and period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2336.877545	(37,180)	0.0000
Cross-section Chi-square	1408.267448	37	0.0000
Period F	444.003125	(5,180)	0.0000
Period Chi-square	590.582398	5	0.0000
Cross-Section/Period F	2098.272350	(42,180)	0.0000
Cross-Section/Period Chi-square	1412.601993	42	0.0000

Sumber : EViews 7.2, diolah

Hipotesis :

$H_0 = \text{pooled least square (PLS)}$

$H_1 = \text{fixed effect model (FEM)}$

Kesimpulan :

prob. (*F*-statistic) < : menolak $H_0 \rightarrow$ menggunakan FEM

Tabel 4 : **Hasil Hausman Test**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.473847	5	0.0916

Sumber : EViews 7.2, diolah

Hipotesis :

$H_0 = \text{random effect model (REM)}$

$H_1 = \text{fixed effect model (FEM)}$

Kesimpulan :

prob. (*chi-square statistic*) > : menerima $H_0 \rightarrow$ menggunakan REM

Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Estimasi *random effect* mendapatkan hasil pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia dalam bentuk persamaan:

$$IPM_{it} = 64,67887 + 0,729408PAD_{it} - 0,358738DAU_{it} + 2,832131DAK_{it} + 0,086005DBH_{it} + 0,868588PE_{it}$$

Tabel 5 : Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.67887	0.924870	69.93290	0.0000
PAD?	0.729408	0.240742	3.029826	0.0027
DAU?	-0.358738	0.065330	-5.491138	0.0000
DAK?	2.832131	0.536862	5.275344	0.0000
DBH?	0.086005	0.139634	0.615931	0.5386
PE?	0.868588	0.096922	8.961751	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.455692	Mean dependent var	5.162772	
Adjusted R-squared	0.443432	S.D. dependent var	1.080958	
S.E. of regression	0.806432	Sum squared resid	144.3739	
F-statistic	37.17141	Durbin-Watson stat	0.900620	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Eviews 7.2, diolah

Tabel 6 : Efek Individual (C+Ci) Kabupaten/Kota

Kab/Kota	C + Ci	Kab/Kota	C + Ci	Kab/Kota	C + Ci
Kab. Bangkalan	59.15555	Kab. Malang	64.696	Kab. Trenggalek	67.37996
Kab. Banyuwangi	63.03975	Kab. Mojokerto	67.33732	Kab. Tuban	62.02581
Kab. Blitar	68.06603	Kab. Nganjuk	64.42424	Kab. Tulungagung	67.30152
Kab. Bojonegoro	57.68943	Kab. Ngawi	63.57743	Kota. Blitar	71.04675
Kab. Bondowoso	57.32251	Kab. Pacitan	66.0633	Kota. Kediri	70.73483
Kab. Gresik	67.14848	Kab. Pamekasan	58.80794	Kota. Madiun	70.48178
Kab. Jember	59.14624	Kab. Pasuruan	61.04363	Kota. Malang	71.122
Kab. Jombang	67.24113	Kab. Ponorogo	64.40071	Kota. Mojokerto	71.22576
Kab. Kediri	67.04869	Kab. Probolinggo	56.93457	Kota. Pasuruan	67.80551
Kab. Lamongan	63.08482	Kab. Sampang	54.05088	Kota. Probolinggo	67.9673
Kab. Lumajang	62.04898	Kab. Sidoarjo	70.50548	Kota. Surabaya	69.65349
Kab. Madiun	64.43201	Kab. Situbondo	58.59824	Kota. Batu	67.18229
Kab. Magetan	67.1431	Kab. Sumenep	60.86361		

Sumber : Eviews 7.2, diolah

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui angka IPM awal masing-masing daerah jika semua variabel independen bernilai nol (0). Angka IPM tersebut diperoleh dari nilai intersep *common model* (C) ditambah dengan nilai intersep individu (C_i). Dari tabel diatas Kota Mojokerto memiliki efek individual terbesar dengan nilai IPM sebesar 71,22 sedangkan Kabupaten Sampang memiliki efek individual terkecil dengan nilai IPM sebesar 54,05.

Berdasarkan hasil estimasi random effect pada tabel 5 dan ($\alpha = 0,05$), diperoleh hasil sbb :

1. Variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan koefisien 0,729408
2. Variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dengan koefisien 0,358738
3. Variabel DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan koefisien 2,832131
4. Variabel DBH berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dengan koefisien 0,086005
5. Variabel PE berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan koefisien 0,868588
6. Semua variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH, PE) berpengaruh simultan terhadap IPM
7. Variasi IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 44,34%.

Tabel 7 : Hasil Estimasi *Standardized Variables*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.69E-05	0.147008	-0.000455	0.9996
PAD?	0.068396	0.022689	3.014496	0.0029
DAU?	-0.109292	0.019909	-5.489515	0.0000
DAK?	0.101872	0.019243	5.294089	0.0000
DBH?	0.009341	0.015107	0.618322	0.5370
PE?	0.185118	0.020618	8.978459	0.0000

Sumber : EViews 7.2, diolah

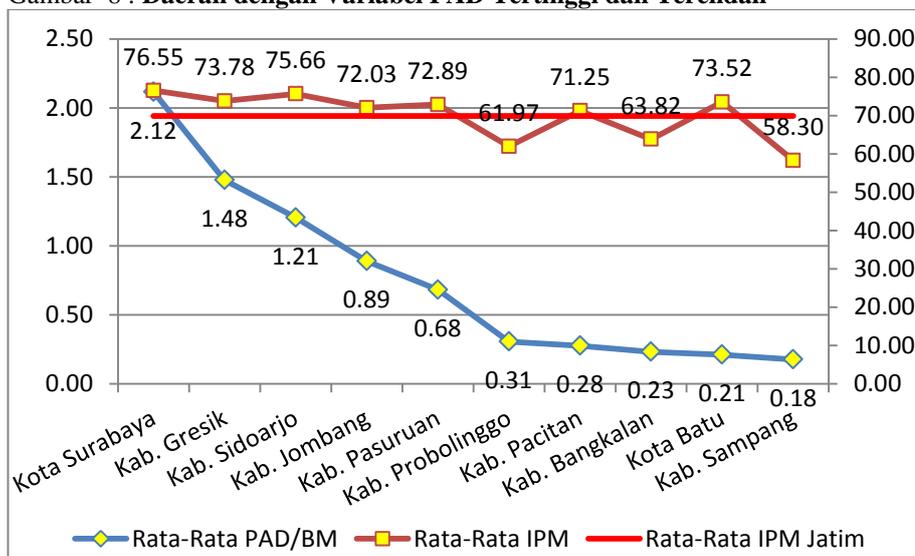
Berdasarkan tabel 7 variabel PE mempunyai pengaruh paling dominan terhadap IPM sedangkan variabel DBH mempunyai pengaruh paling kecil/lemah terhadap IPM.

Variabel PAD atau rasio PAD/BM mempunyai koefisien positif terkecil sebesar 0,729408, yang berarti setiap kenaikan 1 unit rasio PAD/BM hanya mampu menambah IPM sebesar 0,73. *Setali tiga uang* dengan fakta empiris yang ada dimana porsi PAD *cuma* menyumbang 10% dari total rata-rata APBD kabupaten/kota di Jawa Timur. Kombinasi dua hal tersebut membuat peningkatan IPM dari variabel PAD menjadi semakin sulit.

Kondisi demikian patut disayangkan karena daerah tidak dapat memanfaatkan *keuntungan* dari hubungan positif tersebut dalam meningkatkan IPM. Meskipun mempunyai koefisien terkecil namun variabel PAD mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan variabel positif lainnya yang bernilai lebih besar. Keunikan tersebut terletak pada kewenangan pengelolaan PAD yang terletak pada daerah, berbeda dengan variabel DAK maupun pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan koordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah pusat dan swasta untuk meningkatkan kemampuan variabel yang bersangkutan. Peningkatan input APBD melalui pintu PAD akan membuat kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal menjadi lebih besar sehingga dapat meningkatkan *outcome* dalam bentuk peningkatan IPM.

Berdasarkan gambar 8 terlihat perbandingan lima daerah dengan rasio PAD/BM tertinggi dengan lima daerah dengan rasio PAD/BM terendah. Lima daerah dengan rasio tertinggi yang dipimpin oleh Kota Surabaya mempunyai rata-rata IPM diatas rata-rata IPM Jawa Timur sedangkan lima daerah dengan rasio PAD/BM terendah mempunyai rata-rata IPM dibawah rata-rata IPM Jatim.

Gambar 8 : Daerah dengan Variabel PAD Tertinggi dan Terendah



Sumber : DJPK, BPS Provinsi Jatim, diolah

Selanjutnya untuk variabel DAU atau rasio DAU/BM diperoleh hasil estimasi yang berbeda dibandingkan variabel independen lain. Dari tabel 5 terlihat bahwa variabel DAU merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit rasio DAU/BM akan menyebabkan penurunan IPM sebesar 0,36.

Adanya hubungan negatif signifikan tersebut sesuai dengan formulasi DAU itu sendiri dimana meskipun DAU bersifat *block grants* yang penggunaannya diserahkan ke daerah namun perlu diingat bahwa dalam formulasi DAU, komponen alokasi dasar masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai (gaji PNS Daerah) sehingga peningkatan DAU justru menyebabkan penurunan IPM karena peningkatan tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai bukan belanja modal. Pembahasan variabel DAU tidak tepat jika dilakukan secara individual karena DAU sebagai salah satu dana perimbangan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara umum berdasarkan hasil estimasi, rasio DAU/BM yang tinggi menandakan IPM yang rendah dikarenakan adanya pengurangan yang cukup besar dari nilai koefisien variabel DAU. Namun secara individual hasil yang didapatkan terkadang berbeda mengingat tujuan pemerataan berpedoman kepada formulasi DAU yg mempertimbangkan seberapa besar “kewajiban” yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat dalam membiayai belanja pegawai daerah serta mempertimbangkan kemandirian fiskal daerah yang bersangkutan.

Estimasi variabel DAK atau rasio DAK/BM diperoleh hasil variabel DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien sebesar 2.832131. Nilai koefisien tersebut berarti setiap kenaikan 1 unit rasio DAK/BM akan meningkatkan IPM sebesar 2,83.

Adanya kenaikan IPM yang cukup signifikan dari peningkatan variabel DAK dapat dimaklumi karena DAK merupakan *special grants* yang penggunaannya sudah ditentukan sebagai dana infrastruktur, yaitu belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Serupa dengan variabel DAU, pembahasan DAK juga tidak tepat jika dilakukan secara individual karena sifatnya sebagai dana pemerataan. Ada dua pertimbangan dalam alokasi DAK, yaitu DAK untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dan DAK untuk daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal. Daerah dengan variabel DAK yang tinggi belum tentu mempunyai IPM yang tinggi demikian sebaliknya. Pembahasan secara individual harus melihat komposisi DAK serta kategori daerah bersangkutan. Secara umum daerah dengan rasio DAK/BM yang rendah terdapat pada daerah maju yang mayoritas mempunyai IPM yang tinggi pula.

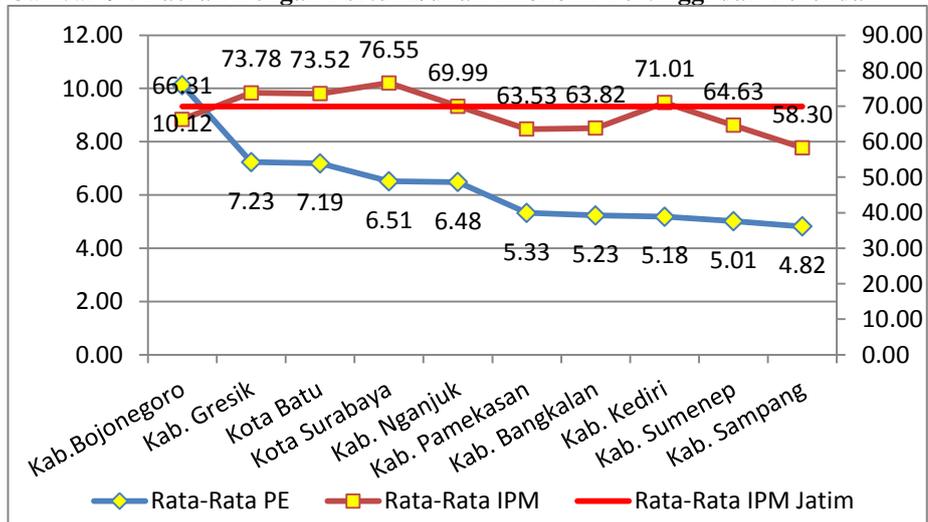
Pembahasan selanjutnya pada variabel DBH atau rasio DBH/BM yang berdasarkan hasil estimasi tabel 5 tidak signifikan mempengaruhi IPM. Kenaikan 1 unit variabel DBH mampu meningkatkan IPM sebesar 0,08 namun tidak signifikan. Karena variabel DBH tidak signifikan, pembahasan yang lebih penting adalah mengetahui mengapa variabel DBH tidak signifikan mempengaruhi IPM.

Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang bersifat *block grants* seperti Dana Alokasi Umum sehingga pengelolaan maupun penggunaannya merupakan wewenang pemerintah daerah. Khusus untuk DBH, istilah *block grants* sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh negara berdasarkan peraturan terkait (*earmarking*). Komponen tersebut antara lain DBH Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi digunakan untuk RHL (rehabilitasi hutan dan lahan), DBH Migas digunakan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar dan DBH Cukai digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal. Porsi yang tidak terlalu besar dan adanya *earmarking* dari ketiga komponen DBH diatas membuat total DBH yang dapat digunakan secara fleksibel melalui output belanja modal membuat variabel DBH menjadi tdk signifikan mempengaruhi IPM. Sejalan dengan pembahasan diatas, berdasarkan tabel 7 variabel DBH merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling kecil terhadap IPM. Hasil kedua estimasi tersebut semakin memperkuat pembahasan bahwa adanya *earmarking* membuat rasio DBH/BM menjadi variabel yang tidak hanya tidak signifikan namun juga berpengaruh paling kecil terhadap IPM

Pembahasan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol yg turut mempengaruhi IPM sesuai dengan hasil estimasi dan kajian pustaka. Pada tabel 5 variabel PE atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan dengan koefisien sebesar 0.868588. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 unit pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan IPM sebesar 0,86.

Hubungan positif tersebut sesuai dengan kajian teori *Human Development Report* tahun 1996 yang dikeluarkan oleh UNDP. Pada gambar 9 terlihat bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung mempunyai IPM yang tinggi diatas rata-rata IPM Jatim sedangkan daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi rendah cenderung memiliki IPM dibawah rata-rata IPM Jatim. Sedangkan berdasarkan tabel 7, variabel PE merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap IPM. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi peningkatan output belanja modal lebih besar secara keseluruhan, tidak hanya dari pengeluaran pemerintah namun juga investasi dari pihak swasta. Pertumbuhan ekonomi akan membuat anggaran pendapatan yang diperoleh pemerintah menjadi meningkat yang diikuti pula dengan penambahan alokasi belanja modal. Peningkatan output belanja modal dari pemerintah dan swasta sebagai akibat pertumbuhan ekonomi membuat variabel PE menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi IPM.

Gambar 9 : Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dan Terendah



Sumber : DJPK, BPS Provinsi Jatim, diolah

Implikasi Penelitian

Dari pembahasan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka peningkatan IPM kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari lima variabel independen, variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti melalui implikasi kebijakan pemerintah daerah dengan pertimbangan sbb :

- a. Variabel PAD atau rasio PAD terhadap belanja modal berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan IPM. Bertolak dari hasil penelitian dan sesuai dengan semangat desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal, pemerintah daerah harus lebih fokus dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai belanja daerah. Namun perlu pertimbangkan bahwa upaya-upaya peningkatan PAD juga harus melihat sumber daya dan kemampuan daerah sehingga tidak terjadi *trade off* dimana keinginan yang menggebu untuk mendongkrak PAD justru menjadi *disinsentif* yang mematikan potensi ekonomi (investasi) daerah. Kondisi ini terjadi jika pemerintah daerah membuat banyak kebijakan melalui peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi tanpa melihat kemampuan daerah sehingga membuat masyarakat terbebani dan membuat pelaku usaha segan untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha di daerah tersebut.

- b. Variabel pertumbuhan ekonomi juga turut menyumbang peningkatan IPM. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan atau setidaknya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kajian teori tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia (IPM) juga masih relevan, terbukti dari hasil estimasi yang berpengaruh positif signifikan. Adanya sinergi positif tersebut seharusnya turut memotivasi pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih pada pertumbuhan ekonomi karena ibarat pepatah, *sekali dayung dua-tiga pulau terlampaui*, pertumbuhan dan kesejahteraan dapat tercapai sekaligus. Hanya saja perlu diperhatikan jangan sampai mengulang kegagalan teori *trickle down effect* pada masa lampau dimana fokus utama hanya mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan distribusi pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang mapan dan berkelanjutan (*sustainable*) adalah pertumbuhan yang mampu meningkatkan investasi khususnya sektor riil melalui penyerapan tenaga kerja dalam sektor industri pertanian, perkebunan maupun UMKM yang merupakan ciri khas daerah di Jawa Timur bukan pertumbuhan ekonomi semu yang hanya ditopang dari konsumsi masyarakat.
- c. Kontribusi dana perimbangan kurang berpengaruh dalam peningkatan IPM, hanya variabel DAK yang berpengaruh positif signifikan, variabel DAU berpengaruh negatif sedangkan DBH tidak signifikan mempengaruhi IPM. Temuan ini seharusnya dapat mengubah *mindset* pemerintah daerah agar tidak terlalu bergantung dengan dana perimbangan dalam pembangunan manusia.
- d. Formulasi DAU khususnya kebutuhan fiskal perlu dikaji ulang agar tujuan pemerataan dari DAU tidak *bias*. Kebutuhan fiskal merupakan komponen penting dalam perhitungan DAU. Kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal atau disebut sebagai celah fiskal menjadi tolok ukur dalam menentukan seberapa besar porsi “kue” yang diterima oleh daerah. Salah satu variabel dalam perhitungan kebutuhan fiskal yang berpotensi membuat DAU menjadi bias adalah indeks PDRB per kapita. Semakin besar indeks PRDB per kapita akan semakin besar kebutuhan fiskal yang berarti pula akan memperbesar porsi DAU yang diterima oleh suatu daerah. Padahal daerah dengan indeks PDRB per kapita dapat diasumsikan sebagai daerah maju. Dengan kata lain daerah yang sudah maju dengan indikator indeks PDRB per kapita yang tinggi akan mendapat DAU yang besar dan sebaliknya daerah kurang maju/tertinggal dengan indeks PDRB per kapita yang rendah justru mendapat DAU yang kecil. Dana DAU yang berasal dari celah fiskal itulah yg dapat digunakan secara fleksibel dalam bentuk belanja modal untuk dapat meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan manusia (IPM)

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan baik secara statistik maupun pembahasan komprehensif berdasar fakta empiris, kajian teori maupun peraturan terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan PAD dan DAK dalam membiayai belanja modal akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
2. Rasio DAU terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan kata lain semakin besar kemampuan DAU dalam membiaya belanja modal akan dapat menurunkan indeks pembangunan manusia.
3. Rasio DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan DBH dalam membiayai belanja modal akan meningkatkan indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan.
4. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan kata lain semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
5. Variabel PE mempunyai pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, variabel DAK, variabel PAD, dan variabel DBH. Variabel DAU menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap IPM

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S.R., Sari, D.W., Setianto, R.H. & Primanti, M.R. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta : Salemba Empat.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Pembangunan Ekonomi* (Edisi 4). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996-2011*. <http://www.bps.go.id> diakses pada 5 April 2013
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2013. *E-book Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2008-2012*. <http://jatim.bps.go.id/e-pub/2013/> diakses pada 5 April 2013.
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2013. *E-book Jawa Timur dalam Angka 2012*. <http://jatim.bps.go.id/index.php/pelayanan-statistik/> diakses pada 5 Juni 2013
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2013. *E-book Jawa Timur dalam Angka 2011*. <http://jatim.bps.go.id/index.php/pelayanan-statistik/> diakses pada 6 Juni 2013
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2013. *E-book Statistik Gender Jawa Timur 2011*. <http://jatim.bps.go.id/index.php/pelayanan-statistik/> diakses pada 7 Juni 2013
- BAPPENAS, UNDP. 2010. *Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah : Alat-alat Praktis dari Indonesia*. Jakarta : UNDP Indonesia
- Budiriyanto, Eko. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Formulasi DAU*. DJPK Kemenkeu RI, 28 Nopember 2011
- Departemen Keuangan, BAPPENAS. 2009. *Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2007. *LGF Realisasi*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 2 April 2013
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2008. *LGF Realisasi*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 2 April 2013
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2009. *LGF Realisasi*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 2 April 2013
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2010. *LGF Realisasi (Annual)*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 2 April 2013
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *LGF Realisasi (Annual) update per 3 November 2012*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 2 April 2013
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu. 2013. *Menkeu Sambut Positif Spending Review Ditjen Perbendaharaan*. <http://perbendaharaan.go.id/new/> diakses pada 1 Maret 2013

- Gujarati. 2004. *Basic Econometric, 4th ed.* New York : McGraw-Hill.
- Gujarati, Damodar, Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika* (Edisi 5). Jakarta : Salemba Empat
- Hanafi, Imam, Tri Laksono Mugroho. 2009. *Desentralisasi Fiskal : Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Malang : UB Press.
- Hendarmin. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.* Jurnal EKSOS Vol. 8 No. 3 Hal. 144-145 Oktober 2012
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV. 2013. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan IV–2012.* <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/> diakses pada 4 April 2013
- Khusaini, Moh. 2006. *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah.* Malang : BPFU Unibraw.
- Kurniadi, Bayu Dardias. 2012. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia.* Makalah disajikan dalam seminar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung, 26 November 2012.
- Kusreni, Sri & Suhab, Sultan. 2009. *Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.* DIE – Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Vol. 5 No. 3, April 2009
- Muluk, M.R. Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah.* Malang : Bayumedia Publishing.
- Ntogwa Ng’habi, Bundala. 2012. *Economic Growth and Human Development; A Link Mechanism : An Empirical Approach.*
- Pambudi, Septian Bagus. 2008. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.* Bogor : IPB Bogor
- Paramita, Ahsani. 2012. *Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar Periode 2000-2009.* Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Rukmana, Didi. Tanpa Tahun. *Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan.*
- Saputra, Putu Mahardika. 2010. *Modul Mata Kuliah Ekonometrika I, Analisis Data Panel Dengan Mempergunakan Eviews 7.* Malang : Universitas Brawijaya
- Sumantyo, Bambang. (bsumantyo@gmail.com). 25 Juni 2013. *Data Realisasi APBD 2006.* E-mail kepada Decta Pitron Lugastoro via Dian Merini (dnd.nailatayank@gmail.com)
- Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara.* Jakarta : Grasindo
- Todaro, M.P., Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan).* Jakarta : Erlangga
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

UNDP. 2004. *Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia*. <http://www.undp.or.id/archives/> diakses pada 1 April 2013

Wibowo, Edi. 2008. *Strategi Perancangan Kebijakan Umum APBD Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten Bogor*. Bogor : Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor.

Widarjono, Agus. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia, Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Malang : Bayumedia Publishing.